



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 18 Mei 2020

Halaman: 2

## SASAR KELUARGA TERDAMPAK NON KMS

# BLT APBD Tahap Kedua Siap Dikucurkan

**YOGYA (KR)** - Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dibiayai menggunakan APBD Kota Yogya pada tahap kedua akan segera dikucurkan. Pada tahap ini sasarannya ialah keluarga yang terdampak pandemi virus Korona namun tidak menjadi pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS).

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan total penerima BLT APBD Kota Yogya mencapai 13.814 Kepala Keluarga (KK). Itu terdiri dari dua kategori, yakni pemegang KMS sebesar 5.483 KK, dan non KMS 8.331 KK. Untuk penerima bantuan yang masuk dalam pro-

gram KMS sudah dikucurkan tahap pertama sejak Selasa (12/5) lalu. Nah yang tahap kedua atau non KMS minggu ini," jelasnya, Minggu (17/5).

Pencairan BLT APBD tidak bisa dilakukan bersamaan karena butuh proses validasi yang cukup ketat. Bagi pemegang

KMS maka validitasnya sudah tidak diragukan. Akan tetapi yang non KMS harus divalidasi ulang agar tidak mendapatkan double manfaat dari Kementerian Sosial (Kemensos). Meski non KMS, namun calon penerima BLT APBD Kota Yogya tersebut sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Mereka juga belum terakomodir program dari pusat sehingga perlu diusulkan oleh daerah.

Heroe menambahkan, teknis penyaluran akan dilakukan seperti tahap pertama. Pemkot bekerja sama dengan kantor pos

yang menerjunkan petugasnya untuk mengantarkan bantuan ke rumah calon penerima sesuai daftar. Begitu juga nominal bantuan yang akan diterima tidak ada perbedaan, yakni Rp 600.000 per bulan untuk periode April, Mei dan Juni. Nominal tersebut akan dijadikan satu paket, sehingga setiap penerima akan memperoleh Rp 1,8 juta sekaligus. "Penerima bantuan baik yang diakomodasi pusat, provinsi maupun kota, jumlahnya hampir tiga kali lipat dari pemegang KMS. Semoga sudah mampu menjangkau semua yang terdampak," urainya.

Sementara Kepala Dinas Sosial

Kota Yogya Agus Sudrajat, sebelumnya mengungkapkan dari 8.331 KK calon penerima BLT tersebut, 1.005 KK di antaranya merupakan keluarga yang tidak lagi masuk dalam KMS. "Tahun sebelumnya masuk jadi pemegang KMS, tapi untuk pendataan tahun ini tidak lagi masuk. Asumsi kami, mereka baru tiga bulan tidak menjadi pemegang KMS tentunya sangat rentan terdampak sehingga kami usulkan menerima bantuan," jelasnya.

Diakuinya, validasi data agar tidak ada penerima bantuan yang double dalam satu keluarga juga bukan perkara mudah. Hal ini

karena beberapa program dari pusat basis datanya ialah nama penerima. Padahal data bantuan bagi terdampak Covid-19 saat ini berbasis KK. Dalam penelusuran awal, pihaknya bahkan menemukan hampir empat ribu data yang berpotensi double jika tidak dicoret. "Jadi misal orangtua tercatat menerima BLT, namun anak atau istrinya juga menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Makanya salah satunya harus dicoret. Untuk mencocokkan data itu juga tidak mudah. Kami harus membuat aplikasi khusus karena jumlahnya ribuan," paparnya. (Dhi)-a

| Instansi        | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-----------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 04 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005